

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Ekonomi Politik

Ekonomi politik dipahami sebagai kerangka analisis yang mengungkap relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat (Blyth, 2013). Dalam penelitian ini, ekonomi politik digunakan sebagai *grand theory* bagi kajian *austerity* dengan memandang kebijakan fiskal sebagai hasil interaksi antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi (Alesina et al., 2019).

Dimensi ekonomi politik dari konsolidasi fiskal yang melibatkan elemen *austerity* sangat krusial. Hal ini didasarkan dari buku karya Alesina, Favero, dan Giavazzi (2019) yang menjelaskan bahwa para pembuat kebijakan atau politisi menjadi penentu kebijakan *austerity* ini akan diterapkan, bahkan para pembuat kebijakan di Eropa pada rentang tahun 2011 hingga 2014 sudah menormalisasi *austerity*, tetapi tidak sepenuhnya mengetahui cara menerapkan dengan benar dan kemudian ada yang berhasil serta ada pula yang gagal.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam tradisi autonomist marxist, ekonomi politik dipahami sebagai analisis kapitalisme yang menempatkan hubungan antara kapital dan kelas pekerja sebagai pusat. Tronti menegaskan bahwa perkembangan kapital bukan proses otomatis pasar, melainkan respons terus-menerus terhadap inisiatif dan perlawanan pekerja seperti penolakan kerja, pemogokan, dan sabotase. Karena itu, ekonomi politik baginya bukan hanya soal distribusi sumber daya, tetapi tentang bagaimana konflik kelas terorganisir maupun terpecah yang dapat membentuk negara, kebijakan, dan siklus akumulasi itu sendiri.

Selain itu, James C. Scott memaknai ekonomi politik sebagai studi tentang keterkaitan relasi ekonomi dan kekuasaan dalam pola dominasi dan resistensi sehari-hari. Sebagai contoh dalam bukunya menjelaskan ketertiban masyarakat pedesaan di Malaysia yang dilihatnya sebagai keseimbangan rapuh antara eksploitasi dan resistensi normal, ketika para petani memakai senjata orang lemah, seperti kerja lamban, ketidakpatuhan halus, pencurian kecil, dan gosip untuk mengurangi eksploitasi.

Ekonomi politik di sini dipandang tidak hanya menyangkut struktur kepemilikan dan kebijakan, tetapi juga bagaimana struktur itu dijalankan melalui *public transcript*, yaitu apa yang penguasa dan subordinat tampilkan secara terbuka dan *hidden transcript*, yaitu kritik dan perlawanan halus yang disembunyikan di balik tabir kekuasaan (Scott, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengadopsi perspektif ekonomi politik yang mengintegrasikan tiga tradisi intelektual yang dimulai dari: (1) perspektif Alesina dan Blyth yang memandang *austerity* sebagai hasil negosiasi antara preferensi para pembuat kebijakan dan hambatan yang ditimbulkan oleh mobilisasi sosial; (2) perspektif Mario Tronti, yakni autonomist marxist yang menekankan bahwa perkembangan kapitalisme disebabkan oleh resistensi kelas pekerja, bukan sebaliknya; (3) perspektif James C. Scott yang memandang bahwa perlawanan bukan sebagai kejadian sesaat, melainkan praktik rutin dalam hubungan sosial yang timpang.

Maka dari itu, dalam penelitian ini sejalan dengan perspektif dari Bailey dan Shibata yang mensintesiskan ketiga perspektif tersebut yang dirumuskan dalam

teori *refusal* atau penolakan terhadap kebijakan *austerity*, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

2.1.2. Definisi *Austerity* Dalam Dimensi Ekonomi Politik

Austerity atau penghematan merupakan pendekatan analisis ekonomi politik yang tidak hanya memahami *austerity* sebagai kebijakan ekonomi teknis, melainkan sebagai strategi politik yang melibatkan kepentingan kekuasaan, ideologi, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat (Blyth, 2013). Hal tersebut senada dengan pernyataan Burton (2016) bahwa keputusan tentang pengurangan defisit fiskal tentu saja diambil oleh para politisi.

Di samping itu, Alesina et al. (2019) mendefinisikan *austerity* sebagai proses di mana pengeluaran publik dikurangi dan/atau pendapatan pajak ditingkatkan. Selain itu, Blyth (2013) yang mendefinisikan *austerity* sebagai sebuah strategi deflasi harga dan upah, pemotongan layanan negara dan transfer beban ke masyarakat menengah ke bawah. Dengan kata lain, *austerity* secara nyata mengurangi layanan atau bantuan negara, seperti contoh program subsidi dipangkas atau bergesernya beban biaya ke tangan warga, contohnya pajak naik atau anggaran belanja publik dipangkas, sehingga anggaran negara terlihat lebih kecil. Hal tersebut biasanya dibenarkan oleh narasi bahwa negara perlu mengurangi pengeluaran untuk menurunkan atau menjaga tekanan fiskal, tapi efeknya bersifat regresif yang sering kali menambah beban relatif lebih besar pada orang yang berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis merujuk pengertian *austerity* dari Alesina et al. (2019) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Substansi Kebijakannya (Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Budget Speech 2025)

Variabel substansi kebijakannya, mengacu pada dokumen yang memuat kebijakan tersebut, yaitu dari Inpres No. 1 Tahun 2025 di Indonesia dan Budget Speech 2025 di Malaysia. Variabel ini melihat unsur-unsur *austerity* yang terpenuhi dari kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

a) Pemangkasan Belanja Sektor Publik dan/atau Kenaikan Pajak

Jika sebuah dokumen kebijakan memenuhi unsur pengurangan anggaran pada sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, pengurangan subsidi, dan pemangkasan belanja publik lainnya yang dialihkan dari belanja publik dasar demi mengurangi pengeluaran negara, maka itu adalah penghematan berbasis pengeluaran (*expenditure-based austerity*) dan/atau jika adanya kenaikan pajak maka itu adalah penghematan berbasis pajak (*tax-based austerity*) (Alesina et al., 2019).

2.1.3. Teori Penolakan (*Refusal*) dan Dampak Dalam Dimensi Ekonomi Politik

Teori penolakan atau *refusal* dari Bailey dan Shibata (2019) berakar dari ekonomi politik yang bertujuan untuk melihat dinamika dua arah antara rencana *austerity*, yaitu kebijakan *austerity* yang diusulkan untuk mengurangi pengeluaran negara atau memindahkan beban negara dan penolakan yang muncul dari warga, serikat, kelompok-kelompok miskin atau aktor politik lain. Rujukan utama teori tersebut berasal dari tradisi autonomist marxist dan pemikiran James C. Scott, seorang ilmuwan politik dan antropolog yang mengembangkan konsep perlawanan sehari-hari (*everyday resistance*). Scott dalam artikel Bailey dan Shibata (2019)

menjelaskan secara sederhana bahwa perlawanan bukanlah kejadian sesaat melainkan bagian rutin dari hubungan sosial yang timpang.

Di samping itu, dalam artikel Bailey et al. (2018) menjelaskan teori autonomist marxist secara sederhana, yaitu mereka yang berada dalam posisi subordinasi selalu memiliki kemampuan untuk menolak. Di bawah pengaruh kondisi ketidaksetaraan, setiap individu atau kelompok subordinat terus-menerus melakukan “taktik kecil”, seperti protes massa, mogok kerja, sabotase administratif, litigasi, perlawanan sehari-hari untuk mengganggu atau membentuk ulang kebijakan (Scott, 2016).

Jadi, berdasarkan penjelasan Teori autonomist marxist dan Teori *resistance* James C. Scott, maka David Bailey dan Saori Shibata menggabungkan dan menyederhanakannya menjadi teori penolakan (*refusal*) dan dampak yang terdiri dari 4 bentuk penolakan dan 1 bentuk dampak sebagai variabel penilaian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Resistensi Tidak Kentara (*Imperceptible Resistance*) merupakan bentuk penolakan yang paling halus dan seringkali maknanya tidak terdeteksi secara jelas pada pandangan pertama. Bentuk penolakan ini biasanya lebih dipahami secara bersama oleh mereka yang berada dalam posisi subordinat yang sama karena mereka berbagi: (1) pengalaman yang sama terhadap eksploitasi; (2) norma-norma yang sama tentang keadilan; (3) risiko yang sama jika resistensi menjadi terbuka. Dalam konteks kebijakan *austerity*, bentuk penolakan ini dapat berupa perbedaan pendapat terhadap kebijakan yang ada, seperti salah satunya dalam bentuk kritik kultural dan/atau simbolis yang lebih dipahami secara mendalam oleh mahasiswa yang mendukung dan/atau mengikuti aksi

penolakan terhadap kebijakan *austerity*, seperti halnya dalam demonstrasi “Indonesia Gelap”, demonstrasi “#Tekan” dan “Turun Anwar”.

2. Penentangan Publik Tidak Mengganggu (*Non-Disruptive Public Opposition*) mencakup bentuk-bentuk penolakan yang terlihat secara publik namun tidak secara signifikan mengganggu jalannya kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, bentuk penolakan yang digunakan salah satunya berupa demonstrasi damai berskala kecil yang tidak sampai menghalangi lalu lintas publik.
3. Penentangan Publik Mengganggu (*Disruptive Public Opposition*) merupakan bentuk resistensi yang tidak hanya terlihat secara publik tetapi juga secara aktif mengganggu atau menghambat implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, bentuk penolakan yang digunakan salah satunya berupa demonstrasi berskala besar yang sampai menghalangi lalu lintas publik.
4. Penolakan Militan (*Militant Refusal*) merupakan bentuk penolakan yang paling ekstrem, mencakup aksi-aksi yang bersifat konfrontatif dan berpotensi menimbulkan kekerasan. Dalam konteks penelitian ini, bentuk penolakan yang digunakan salah satunya adalah demonstrasi yang mengandung unsur-unsur vandalisme dan/atau mengandung unsur-unsur kekerasan seperti mencoret tembok dengan cat semprot, membakar ban, membakar fasilitas umum, melempar petasan atau molotov, dan lainnya yang bertujuan menggagalkan implementasi kebijakan secara total.
5. Dampak penolakan (mahasiswa) terhadap kebijakan *austerity* adalah hasil atau konsekuensi yang dapat diidentifikasi dari tindakan penolakan (mahasiswa) terhadap kebijakan tersebut, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa elemen dampak penolakan terhadap kebijakan dari

Bailey & Shibata, (2019) yang terdiri dari: (1) pembatalan keseluruhan kebijakan; (2) revisi kebijakan, baik secara penuh maupun parsial; atau (3) tidak adanya perubahan terhadap kebijakan. Dampak ini bersifat indikatif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penolakan mahasiswa itu sendiri.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara peneliti dalam mencari inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilakukan melalui perbandingan, literatur terdahulu membantu peneliti dalam mencari tahu posisi penelitian. Terdapat beberapa literatur terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Penulis	Fokus	Teori yang Digunakan	Metode	Temuan Utama
1.	Austerity and Anti-Austerity: The Political Economy of Refusal in 'Low-Resistance' Models of Capitalism	David Bailey & Saori Shibata (2019)	Perbandingan bentuk penolakan terhadap kebijakan <i>austerity</i> di Inggris dan Jepang serta perbandingan dampak dari penolakan tersebut	Teori <i>Austerity</i> dan Teori Penolakan	Kualitatif FsQCA, studi literatur dan analisis dokumen	Bentuk penolakan ke-2 di Jepang dapat menghalangi <i>austerity</i> . Sedangkan, di Inggris keempat bentuk penolakan dapat menghalangi penerapan <i>austerity</i> .
2.	Austerity: The New Normal A Renewed Washington Consensus 2010-24	Isabel Ortiz & Matthew Cummins (2019)	Analisis penerapan dan pengaruh kebijakan <i>austerity</i> di 189 negara pada tahun 2010-2024	Teori ekonomi politik <i>rights-based development</i> Teori <i>Austerity</i>	Kualitatif komparatif dan analisis dokumen IMF World Economic	<i>Austerity</i> telah memengaruhi sekitar 75% populasi dunia, terutama di negara

					c Outlook serta literatur.	berkembang seperti Indonesia dan Malaysia.
3.	Crises of the welfare state, resilience, and pessimism of the intellect	Farnsworth dan Irving (2024)	Analisis penerapan dan pengaruh kebijakan <i>austerity</i> di negara aliansi G7	Teori <i>austerity</i>	Kualitatif komparatif	Penerapan <i>austerity</i> di negara aliansi G7 mengakibatkan berkurangnya kebijakan sosial.
4.	Macro-Economic Policy Responses to Financial Crises in Malaysia, Indonesia and Thailand	Anita Doraisami (2014)	Analisis kebijakan <i>austerity</i> dalam perspektif makroekonomi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.	Teori makroekonomi <i>austerity</i> , Teori Krisis Finansial, Teori Stimulus Fiskal	Studi Komparatif Kualitatif, studi dokumen dan literatur	<i>Austerity</i> di Thailand dan Indonesia mengikuti paket IMF yang mempercepat resesi, sementara Malaysia memilih kontrol modal yang menunda resesi.
5.	Floating Prices, Fearing Backlash: Economics and Politics of Malaysia's Petrol Subsidy Reform	Lee Hwok Aun (2025)	Menganalisis penerapan rasionalisasi subsidi bensin RON95 dan membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.	Teori <i>Fiscal Savings</i>	Kualitatif	Kombinasi pemangkasan subsidi RON95 dengan SST di Malaysia akan memiliki potensi penolakan dari masyarakat.
6.	Assessing Fiscal Inefficiencies and Middle-Class Vulnerabilities: A Critical Analysis	Amelia (2025)	Menganalisis kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan membandingkan secara umum kebijakan <i>austerity</i> di	Ekonomi politik kritis	Kualitatif dengan paradigma kritis	Inpres No. 1 Tahun 2025 dianggap kebijakan <i>austerity</i> yang menurunkan anggaran pendidikan dan

	of Economic Policies Under President Prabowo's Administ ration		Indonesia dan Malaysia.			memperleba r ketimpangan , dibandingka n strategi <i>austerity</i> di Malaysia yang berhasil meningkatka n anggaran pendidikan.
--	---	--	----------------------------	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa berbagai penelitian terdapat persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaan tersebut adalah beberapa teori dan metode penelitian yang digunakan sama, namun terdapat juga perbedaan atau kekosongan penelitian dimana belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis isu dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025 yang akan diteliti oleh penulis secara kualitatif deskriptif dengan studi komparatif.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Deskripsi untuk kerangka pemikiran pada **Gambar 2.1**, penulis sebagai permulaan akan menganalisis dan mengidentifikasi kebijakan *austerity* yang muncul dari dokumen Inpres No. 1 Tahun 2025 yaitu kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan di Indonesia lalu Budget Speech 2025 yang menjadi akar dari kebijakan rasionalisasi subsidi bensin RON95 serta perluasan SST yang akan dianalisis dan diidentifikasi melalui dimensi substansi kebijakan *austerity* yang terdiri dari dua jenis: (1) *expenditure-based austerity*; (2) *tax-based austerity* (Alesina et al., 2019).

Di samping itu, kebijakan *austerity* cenderung memunculkan penolakan dalam penerapannya. Adapun, penulis akan menganalisis isu penolakan mahasiswanya dengan menggunakan teori *refusal* atau penolakan dari Bailey dan Shibata (2019) untuk mengetahui bentuk penolakan mahasiswa di kedua negara, yang terdiri dari: (1) resistensi tidak kentara; (2) penentangan publik tidak mengganggu; (3) penentangan publik mengganggu; (4) penolakan militan (Bailey & Shibata, 2019).

Setelah hasil analisis didapatkan maka penulis akan membandingkan yang selaras dengan level komparasi dari Flick (2018) dapat dilihat pada **Gambar 3.1**. mulai dari: (1) akar kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia; (2) jenis *austerity* di kedua negara; (3) aksi penolakan mahasiswa di kedua negara; (4) bentuk penolakan mahasiswa di kedua negara; (5) dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di kedua negara.